

POLITIK DAN SEJARAH SOSIAL DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Eko Wahid B

Email: ekowahid.89@gmail.com

Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstrak

Dalam perjalanannya antara politik dan sejarah sosial pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan, sehingga mempunyai hubungan yang erat di antara keduanya. Dari tinjauan politik dapat diketahui pengambilan kebijakan-kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan Islam, karena tidak mudah untuk menyatakan bahwa pendidikan terbebas dari politik yang melingkupinya. Begitu juga sejarah sosial pendidikan Islam berusaha memotret jalannya penyelenggaraan pendidikan Islam sehingga dapat diketahui rekam jejak dari penyelenggaraan kebijakan-kebijakan pendidikan yang telah dilaksanakan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu tinjauan antara politik dan sejarah sosial pendidikan Islam sangat penting sebagai pisau analisis untuk melihat jalannya pendidikan Islam secara komprehensif.

Kata Kunci: *politik, sejarah sosial, pendidikan islam*

PENDAHULUAN

Diskursus tentang pendidikan Islam tidak akan pernah terlepas dari dinamika politik dan kebudayaan suatu masyarakat. Dalam konteks Indonesia, dinamika pendidikan Islam tidak bisa terlepas bahkan terbelenggu oleh kebijakan politik negara.¹

Memang politik pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan maupun politik. Akan tetapi, politik pendidikan ini justru masih dikaji terpisah dan jarang dibicarakan. Padahal, begitu banyak masalah yang dapat dikaji dari paradoks politik pendidikan ini. Politik dan pendidikan jika digabungkan bisa terjadi dua pengertian. Pertama, politik pendidikan sebagai sebuah kajian yang mencoba memberikan tawaran ide, wacana, dan transformasi kepada generasi men-datang tentang dunia politik yang berkaitan dengan kekuasaan, penataan dan penge-lolaan kebijakan publik, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan untuk kepentingan umum.²

Secara yuridis, politik pendidikan di Indonesia dituangkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan. Sampai kini telah diterbitkan 3 (tiga) undang-undang sistem pendidikan nasional, yaitu Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran No. 4 Tahun 1950, Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1954 yang diterbitkan pada masa orde lama, Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada masa orde baru, dan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada masa reformasi yang merupakan perubahan dari undang-undang sistem pendidikan nasional sebelumnya.³ Dari kebijakan tersebut juga berimplikasi terhadap keadaan pendidikan

Islam dalam pengakuannya sebagai bagian dari pendidikan nasional.

Dari pemaparan di atas bahwa hubungan antara politik dan pendidikan tidak dapat dipisahkan, karena kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah terkait kebijakan pendidikan juga perimplikasi terhadap proses jalannya pendidikan. Dari sinilah penulis merasa tertarik untuk membahas tentang tinjauan umum politik pendidikan Islam, yang ruang lingkupnya akan dibahas tentang: pengertian politik pendidikan, relasi politik dan pendidikan Islam, pendekatan sejarah sosial dalam politik pendidikan Islam.

PEMBAHASAN

Politik berasal dari kata *politic* (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Dalam kamus berarti *acting or judgeing wisely, welljudgedprudent*.⁴ Kata politik diambil dari kata latin *politicus* atau bahasa Yunani (Greek) *politicos* yang bermakna *relating to a citizen*. Kata itu berasal juga dari kata polis yang searti dengan city “kota”. *Politic* kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia, yaitu, segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu Negara atau terhadap Negara lain, dan juga dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik.⁵

Roger F. Soltau sebagaimana yang dikutip Ahmad Rifai ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu: hubungan negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lainnya.⁶

Menurut Deliar Noer sebagaimana dikutip oleh Ahmad Zain, politik adalah segala aktifitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat. Sedikit berbeda dengan Deliar Noer, Miriam Budiardjo berpendapat bahwa, pada umumnya dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu system politik (atau Negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari system itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.⁷

Kehidupan berbangsa dan bernegara tidak terlepas dari kehidupan berpolitik, karena hidup itu sendiri merupakan bagian dari suatu politik.⁸ Politik menyangkut penggunaan dan pengaturan kekuasaan, pengaruh dan pengawasan, terutama dalam alokasi materi yang diinginkan oleh rakyat. Tidak ada suatu kelompok manusia yang dapat lama hidup bersama tanpa pengaturan kekuasaan yang efektif.⁹ Istilah “politik” (*politics*) sering dikaitkan dengan bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik ataupun negara yang menyangkut proses penentuan tujuan maupun dalam melaksanakan tujuan tersebut.

Dalam kehidupan politik, pemerintah berperan mengendalikan negara. Untuk itu perlu legitimasi dan dukungan dari segenap lapisan. Karena itu interaksi antara pengambil keputusan dengan kelompok lain di masyarakat harus dilakukan. Politik mengandung aspek-aspek dari sekian banyak pranata-pranata sosial yang meliputi ekonomi, pertahanan dan keamanan, hukum (*rule of law*), sosial budaya, agama, dan pendidikan.¹⁰

Dari sekian definisi yang ada paling tidak dapat ditemukan dua kecenderungan pendefinisian politik. *Pertama*, pandangan yang mengaitkan politik dengan Negara, yakni dengan urusan pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah. *Kedua*, pandangan yang mengaitkannya dengan masalah kekuasaan, otoritas dan atau dengan konflik.¹¹

Sedangkan kata pendidikan berasal dari kata didik yang mendapat awalan pen- dan akhiran-an, dan berarti perbuatan, hal, dan cara.¹² Menurut Ki Hajar Dewantara sebagaimana dikutip Ahmad Zain pendidikan merupakan tuntutan bagi pertumbuhan anak. Artinya, pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak, agar mereka sebagai manusia sekaligus sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.¹³

Ada beberapa istilah pengertian pendidikan yang digunakan sebagaimana yang dikutip Muhammad Rifai dari pendapat berbagai tokoh, yaitu sebagai berikut:¹⁴

Jamil Saliba mengemukakan pendidikan adalah pengembangan fungsi-fungsi psikis melalui latihan sehingga mencapai kesempurnaan sedikit demi sedikit. M.J. Langeveld mendefinisikan bahwa pendidikan adalah kegiatan membimbing anak manusia menuju kedewasaan dan kemandirian.

Kingsley Price mengemukakan pendidikan ialah proses ketika kekayaan budaya nonfisik dipelihara atau dikembangkan dalam mengasuh anak-anak atau mengajar orang dewasa.¹⁵

Pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia; aspek

rohaniah, dan jasmaniah, juga harus berlangsung secara bertahap. Sebab tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah yang secara langsung tercipta dengan sempurna tanpa melalui suatu proses.¹⁶ Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 1 UU No. 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mendidik secara aktif mengembangkan potensi pembelajaran agar peserta memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.¹⁷

Sementara itu pendidikan Islam sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdul Rahman mengutip dari Al-Nahlawi bahwa pendidikan Islam adalah “sebagai pengaturan pribadi dan masyarakat sehingga dapat memeluk Islam secara logis dan sesuai secara keseluruhan baik dalam kehidupan individu maupun masyarakat (kolektif)”.¹⁸

Omar At-Toumi al-Syaibani dalam Akh. Muzakki pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi diantara profesi-profesi asasi dalam masyarakat. Pendidikan tersebut memfokuskan pada perubahan tingkah laku manusia yang konotasinya pada pendidikan etika. Sementara itu pendidikan Islam menurut Muhammad SA Ibrahimy adalah suatu sistem yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupan sesuai dengan cita-cita Islam, sehingga dengan mudah ia dapat membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁹

Dari pengertian tersebut, dapat menarik benang merah tentang persamaan dan perbedaan antara politik dan pendidikan. Persamaannya, politik dan pendidikan sama-sama berkaitan dengan urusan manusia hidup di dunia, sama-sama sebagai salah satu alat atau jalan manusia untuk mencapai tujuannya, dan manusia tidak bisa dikatakan sama sekali apolitik dan tidak berpendidikan secara total.²⁰

Relasi Politik dan Pendidikan Islam

Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di setiap Negara, baik Negara maju maupun Negara berkembang. Keduanya sering dilihat sebagai bagian-bagian yang terpisah, yang satu sama lain tidak memiliki hubungan apa-apa. Padahal, keduanya bahu membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat disuatu Negara. Lebih dari itu, keduanya saling menunjang dan saling mengisi lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat disuatu Negara.²¹

Politik dan pendidikan sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Ini setidaknya mengacu dari pernyataan dari beberapa kalangan filsuf luar negeri kontemporer, modern, dan posmodern, salah satunya Michael Foucault, yang mengatakan bahwasannya tidaklah mungkin memisahkan kekuasaan bisa berjalan tanpa pengetahuan. Kekuasaan bekerja di dalam proses pembentukan pengetahuan yang merupakan sebuah bentuk kebudayaan. Ada filsuf lain, Francis Bacon yang mengatakan pengetahuan adalah kekuasaan.²²

HAR Tilaar dalam Ahmad Rifai memberikan gambaran kaitan antara pendidikan dan kekuasaan itu dengan sangat halus dan menarik. Di dalam khazanah kearifan budaya masyarakat Indonesia, dikenal ungkapan “guru ratu wong atuwokaro”. Artinya, di dalam masyarakat tradisional Indonesia dikenal tiga sumber yang mengayomi masyarakatnya, yaitu guru, ratu atau pemerintah, dan orang tua atau pemimpin-pemimpin informal dalam masyarakat.²³

Di negara-negara barat, kajian tentang hubungan politik dan pendidikan dimulai oleh Plato dalam bukunya *republic*. Walaupun utamanya membahas berbagai persoalan kenegaraan, buku tersebut juga membahas hubungan antara ideologi dan institusi negara dengan tujuan metode pendidikan.²⁴

Menurut Sunarso Ada empat definisi mengenai politik pendidikan. Pertama, politik pendidikan adalah metode mempengaruhi pihak lain untuk mencapai tujuan pendidikan. Kedua, politik pendidikan lebih berorientasi pada bagaimana tujuan pendidikan dapat dicapai. Ketiga, politik pendidikan berbicara mengenai metode untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya anggaran pendidikan, kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat dan sebagainya. Keempat, politik pendidikan berbicara mengenai sejauh mana pencapaian pendidikan sebagai pembentuk manusia Indonesia yang berkualitas, penyangga ekonomi nasional, pembentuk bangsa yang berkarakter.²⁵

Politik pendidikan menjadi panduan utama perjalanan pendidikan kebangsaan. Dengan adanya politik pendidikan yang jelas, maka konsep pendidikan yang akan

dibentuk dan dicapai akan berada dalam bangunan konsep yang tepat, kuat, dan kokoh. Semua itu akan melahirkan sebuah tatanan pendidikan yang mencerahkan. Dapat menghasilkan produk-produk pendidikan yang berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan, baik secara intelektual, maupun sosial. Bagi pemerintah, selaku pemegang kebijakan pendidikan, politik pendidikan akan membuat kebijakan pendidikan lebih beradab dan mencerahkan.²⁶

Dalam sejarah peradaban Islam, keterkaitan antara pendidikan dan politik sangat terlihat jelas, bagaimana aliran-aliran teologi-fiqih mulai dari mu'tazilah, syi'ah, sunni, jabariyah, maturidiyah, dan lain sebagainya bergulat, bekerjasama dengan kekuasaan, silih berganti untuk saling mengalahkan, dan menghancurkan paham lain. Sejarah peradaban Islam banyak ditandai oleh kesungguhan ulama dan umara dalam memperhatikan persoalan pendidikan dalam upaya memperkuat posisi sosial politik kelompok dan pengikutnya.²⁷

Senada dengan pernyataan di atas, Muhammad Rifai mengutip tulisan M. Sirozi bahwa Khalifah Al-Makmun mem-politisasi majelis *munazharah* di istananya dalam rangka menyebarkan paham Mu'tazilah yang merupakan mazhab resmi negara waktu itu, puncak dari tindakan Al-Makmun, adalah peristiwa inkuisi, yaitu penyelidikan atau interograsi (*al-mihna*) terhadap para ulama dan pejabat penting. Kepada mereka, ditanyakan apakah Al-Qur'an itu termasuk qadim atau hadis. Melalui inkuisi, para ulama pilar penopang lembaga lembaga pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan secara tidak langsung dipaksa menerima paham Mu'tazilah, ideologi resmi penguasa.²⁸

Begitu juga apabila kita tarik ke Nusantara, bahwa proses islamisasi di tanah air, khususnya di Jawa, kita juga dapat melihat bagaimana para Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam tersebut menggunakan berbagai bidang; mendekati kekuasaan, budaya, dan pendidikan. Wali Songo mendekati kekuasaan, yaitu dengan mengislamkan beberapa orang dalam istana kerajaan untuk memberikan pendidikan Islam ke masyarakat luas. Di dalam mendekati kekuasaan tersebut, juga dilakukan proses pertarungan; adu pengetahuan, baik berkaitan dengan ketahanan, alam dunia, etika, pengobatan, dan budaya. Ketika Islam sudah menyebar dan menguasai beberapa kerajaan, seperti di Banten, Mataram, dan Tuban, legitimasi penguasa-raja sangat tergantung pada ulama-kyai-wali yang memiliki lembaga pendidikan pesantren.²⁹

Dari pernyataan tersebut tersebut penulis berpendapat mengapa peran ulama/kyai dalam konteks sekarang masih sangat mempunyai kedekatan dengan berbagai kalangan, tentunya juga para politisi sering menjalin kedekatan hubungan silaturrohmah dengan para ulama ketika akan mencalonkan diri sebagai pemimpin sehingga tidak jarang untuk meminta masukan maupun nasihat (*wejangan*), itu tidak bisa dilepaskan dari sosial sejarah pada waktu itu bahwa ulama mempunyai pengaruh yang sangat kuat baik di mata masyarakat maupun dari kalangan politisi. Selain itu juga sejumlah ulama mempunyai kedudukan yang prestisius di hati masyarakat.

Keterkaitan antara pendidikan dan politik terwujud dalam berbagai macam bentuk yang berbeda-beda antara satu masyarakat dan masyarakat lain maupun antara satu negara dengan negara lain,

adakala hubungannya sangat kuat atau bisa saja hubungannya lemah. Ada perbedaan bahwa di negara-negara berkembang yang lebih maju, pendidikan formal memainkan peran yang sangat penting dan nyata dalam mencapai perubahan politik. Di sebagian negara maju, pendidikan berada dalam arus utama kehidupan politik nasional dan menjadi isu penting dalam wacana politik. Di negara-negara lain, persoalan kebijakan pendidikan kurang mendapat perhatian atau bukan merupakan topik yang hangat dalam publik.³⁰

Pendekatan Sejarah Sosial dalam Politik Pendidikan Islam

Terdapat berbagai teori yang menjelaskan asal usul kata sejarah. Sebagian ada yang berpendapat bahwa kata sejarah berasal dari bahasa Arab *syajarah* yang berarti pohon. Boleh jadi karena sebuah pohon biasanya terdiri dari akar, batang, ranting, dahan, dan daun yang terikat dengan pada proses tumbuh mulai kecil. Kemudian membesar, tegak berdiri, berbunga, berbuah, kemudian layu, dan mati. Dalam sebuah teori, ada yang mengatakan, bahwa sejarah juga seperti pohon, yaitu tumbuh, berkembang, berbuah, dan kemudian mati, bahkan ada ada yang sebelum berbuah tetapi sudah kburu mati.³¹

Adapun secara terminologi berarti sejumlah keadaan dan peristiwa yang terjadi di masa lampau dan benar-benar terjadi pada diri individu dan masyarakat sebagaimana benar-benar terjadi pada kenyataan-kenyataan alam dan manusia.³² Ibnu Khaldun dalam *Wathani* menekankan kepada para pemerhati sejarah bahwa untuk melihat kembali secara objektif, seorang sejarawan harus bisa mengenal dengan jelas berbagai

struktur kebudayaan dan sosial manusia yang akan ditelitinya, termasuk berbagai pemahaman metodologi ke arah ini. Tanpa mengenal dan mengerti dari dekat objek yang akan dikaji berikut metodologinya, mustahil ia bisa menjelaskan fenomena sejarah secara objektif. Tanpa metodologi yang jelas maka, alur penjelasan secara rasional atau rekonstruksi, sistematika-kronologis dan analisisnya akan sulit dimengerti.³³

Adapun penggunaan sejarah sebagai sebuah pendekatan atau pisau analisis dalam studi politik pendidikan Islam, berarti mencoba sekuat tenaga memahami sejumlah peristiwa yang terkait dengan pendidikan Islam pada masa lalu, apa yang terjadi pada masa sekarang, hubungan antara keduanya, yang kemudian semua itu digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang sedang dihadapi oleh umat Islam saat ini maupun yang akan datang.³⁴

Selanjutnya definisi sejarah sosial sebagaimana yang dihimpun oleh Wathani dari pendapat berbagai sumber maupun tokoh adalah:³⁵

Menurut *Canadian Encyclopedia* mendefinisikan sejarah sosial dengan: “*is a way of looking at how a society organizes itself and how this organization changes over time. It is an approach, not a subject. The ultimate goal of social historians is to write the complete history of social relations, but this goal is unlikely ever to be achieved. Nevertheless the goal serves as a constant reminder to historians that aspects of history cannot be considered in isolation and that social history is an integrative study concerned with building towards a global picture of society. Any aspect of society can usefully be studied, but what is important is*

that it be studied within its relationships to other social institutions”. (Adalah cara untuk melihat bagaimana masyarakat mengorganisasi dirinya sendiri dan bagaimana perubahan organisasi ini dari waktu ke waktu. Ini adalah pendekatan, bukan subjek. Tujuan utama dari sejarawan sosial adalah untuk menulis sejarah lengkap tentang hubungan sosial, tetapi tujuan ini tidak mungkin pernah dicapai. Namun demikian tujuan berfungsi sebagai pengingat konstan bagi sejarawan bahwa aspek sejarah tidak dapat dipertimbangkan dalam isolasi/pemisahan dan sejarah sosial merupakan *studi integratif berkaitan dengan membangun sebuah gambaran global masyarakat*. Setiap aspek masyarakat dapat berguna dipelajari, tapi yang penting adalah bahwa hal itu akan dipelajari dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga sosial lainnya).

Menurut Peter N Stearn: “*Social history represented an advance over more traditional political history because it underscored that the stuff of history was not encapsulated in the great events and great men of the past*”. (Sejarah sosial merepresentasikan sebuah kemajuan daripada sekedar sejarah politik tradisional, karena ia menggarisbawahi bahwa bahan sejarah tidak dirumuskan dalam peristiwa besar dan bukan juga orang-orang besar pada masa lalu).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sejarah sosial adalah sebuah disiplin ilmu tersendiri yang mempunyai spesifikasi sebagai sebuah pisau bedah untuk menganalisis sejarah berdasarkan perspektif sosiologis dan juga cenderung melihat peristiwa sejarah secara lebih komprehensif dan seobyektif mungkin berdasarkan fakta-

fakta yang terkadang relatif jarang diungkap di panggung sejarah itu sendiri.³⁶

Dalam lintasan sejarah Islam, adalah sebuah keniscayaan adanya campur tangan politik dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Sejak masa Rasulullah SAW. sampai pada perkembangan pendidikan Islam kontemporer. Rumah al-Arqam yang kemudian diyakini sebagai cikal bakal penyelenggaraan pendidikan Islam adalah bukti bagaimana saat itu pendidikan Islam (*tarbiyyah*) dalam konteks pembinaan dan pengkaderan generasi Islam awal dilakukan oleh Rasulullah SAW.³⁷

Hal tersebut mengindikasikan bahwa proses pendidikan pada periode Makkah lebih terfokus kepada penanaman keimanan serta akhlak mulia karena melihat kondisi masyarakat Makkah pada waktu itu belum mengenal agama yang hakiki. Mereka masih mengikuti tradisi agama nenek moyangnya yaitu agama yang menyembah banyak tuhan yang merupakan buatan mereka sendiri.³⁸

Dari pemaparan tersebut sangat jelas mengapa ruang lingkup pendidikan pada masa Nabi masih terbatas pada sektor pendidikan keagamaan, karena melihat realitas sosial maupun politik pada waktu masih menunjukkan pentingnya pendidikan penanaman nilai-nilai agama serta menurut asumsi penulis pendidikan belum begitu bersinggungan dengan wilayah lain terkait dengan pendidikan umum.

Di samping itu secara sosiologis Nabi belum diakui sebagai kepala negara, bahkan kaum kafir berupaya hendak membunuhnya. Ia masih belum mempunyai posisi politik yang kuat untuk berhadapan secara langsung dengan kekuatan tirani yang berkuasa saat itu. Di sisi lain ada sebuah analisa yang menarik yang dikemukakan oleh Philip K.

Hitti, ia berusaha membuat analisa mengapa Nabi saw. diutus di Makkah, yakni dalam rangka mengatasi penyimpangan akidah dan akhlak yang selanjutnya berdampak pada terjadinya praktek perdagangan yang bersifat kapitalis.³⁹

Jika kita menilik pendidikan pada masa klasik, penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan masih sangat sederhana ditinjau dari berbagai komponennya baik berupa kurikulum, evaluasi, sarana dan prasarana, maupun gurunya. Hal demikian tidak terlepas dari sejarah sosial pendidikan pada masa itu yang merupakan tahap proses dari penataan pendidikan. Namun demikian demikian kita harus mngapreasi bentuk-bentuk pencapain pada masa itu, karena hal itu merupakan embrio untuk perkembangan pendidikan yang ada pada masa sekarang. Bahkan sangat bisa dirasakan kemajuan peradaban sekarang tidak bisa terlepas dari kmajuan-kemajuan yang telah dicapai bangsa terdahulu.

Selanjutnya apabila kita tarik ke dalam pendidikan yang ada di Indonesia akan dijumpai berbagai konfigurasi sejarah sosial yang begitu beragam dan penuh dinamika. Hal ini jika ditilik dari masa perintisan pendidikan Islam pada zaman Wali Songo hingga era reformasi saat ini. Sekedar contoh, secara politis perkembangan pendidikan Islam di masa pemerintahan Orde Baru awal, adanya dualisme bisa dilihat sebagai refleksi dari pergumulan kekuatan politik; antara Islam dan Nasionalisme. Jadi, betapapun telah terjadi rekonsiliasi ideologis dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, namun pada prakteknya implikasi pergumulan ideologis ini terhadap dunia pendidikan tetap sulit dihapuskan.⁴⁰

SIMPULAN

Dari pemaparan diatas kiranya dapat diambil sebuah kesimpulan, bahwa antara politik dan pendidikan Islam saling berkaitan, berbagai aspek kebijakan pemerintah terkait dengan pendidikan Islam sangat berpengaruh terhadap pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Begitu juga dengan politik yang jelas, dapat membawa kemajuan pendidikan yang mencerahkan. Dapat menghasilkan produk-produk pendidikan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara intelektual, maupun sosial.

Begitu juga dalam melihat proses jalannya politik pendidikan Islam penggunaan sejarah sosial sangat dibutuhkan, karena jalannya sistem pendidikan tidak dapat terlepas dari sejarah sosialnya, sehingga akan diketahui jalannya proses penyelenggaraan kebijakan dalam pendidikan Islam secara menyeluruh. Singkatnya baik politik maupun sejarah sosial pendidikan Islam merupakan pisau analisis untuk memotret penentuan kebijakan maupun jalannya proses pendidikan Islam dari waktu ke waktu.

Daftar Rujukan

- Anwar, Kasyful, “Dimensi Hubungan Negara, politik, dan Pendidikan”, *Jurnal Ta’dib*, Vol. XV, No. 02 (2010)
- Muzakki, Akh. dan Kholilah, *Ilmu Pendidikan Islam*, Surabaya: Kopertais IV Press, 2011.
- Maimunah, “Relasi Politik Pendidikan dan Politik Kekuasaan”, *Jurnal Al-Afkar*, Vol. 02 No. 02 (2013)

- Nata, Abuddin, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, 2016
- Rifai, Muhammad, *Politik Pendidikan Nasional*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Rowley, C.D, *Politik Perencanaan Pendidikan di Negara berkembang*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara dan UNESCO, 1982. (Buku Online)
- Rahman, Abdul, “Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Islam-Tinjauan Epistemologi dan Isi- Materi”, *Jurnal Eksis*, Vol.8, No. 1 (2012)
- Sarnoto, Ahmad Zain, “Konsepsi Politik Pendidikan di Indonesia” *Jurnal Educhild*, Vol. 1, No. 1 (2012)
- Sunarso, “Pendidikan Politik dan Politik Pendidikan” *Jurnal Civics*, Vol. 4, No. 2 (2007)
- Satria, Rengga, “Politik Pendidikan Islam, Studi Kebijakan Orde Baru Terhadap Madrasah” *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 10, No. 1, (2014)
- Supriadin, “Politik Pendidikan Islam Di Indonesia: Analisis Sistem Pendidikan Pesantren dan Madrasah, *Jurnal El-Hikmah*, Vol. 8, No.2 (2014)
- Sutarjo, J., “Urgensi Pengetahuan Sejarah Sosial Pendidikan Islam Dalam Dunia Akademis, *Jurnal Tarbiyah*, Vol. 11 No. 2 (2014)
- UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, Bandung: Fokusmedia, 2003.
- Wathoni, Kharisul, “Pendekatan Sejarah dalam Kajian Politik Pendidikan Islam”, *Jurnal Tadris*, Vol. 8 No. 1 (2013)

¹ Rengga Satria, “Politik Pendidikan Islam, Studi Kebijakan Orde Baru Terhadap Madrasah” *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 10, No. 1, (2014), hlm. 112.

² Muhammad Rifai, *Politik Pendidikan Nasional* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 11.

³ Supriadin, “Politik Pendidikan Islam Di Indonesia: Analisis Sistem Pendidikan Pesantren dan Madrasah, *Jurnal El-Hikmah*, Vol. 8, No.2 (2014), hlm. 19

⁴ Ahmad Zain Sarnoto, “Konsepsi Politik Pendidikan di Indonesia” *Jurnal Educhild*, Vol. 1, No. 1 (2012), hlm. 31.

⁵ *Ibid.*

⁶ Muhammad Rifai, *Politik Pendidikan*, hlm. 15.

⁷ Ahmad Zain Sarnoto, “Konsepsi Politik, hlm. 31.

⁸ Kasyful Anwar, “Dimensi Hubungan Negara, politik, dan Pendidikan”, *Jurnal Ta'dib*, Vol. XV, No. 02 (2010), hlm. 302.

⁹ C.D Rowley, *Politik Perencanaan Pendidikan di Negara berkembang* (Jakarta: Bhratara Karya Aksara dan UNESCO, 1982), hlm. 2. (Buku Online)

¹⁰ Kasyful Anwar, “Dimensi Hubungan, hlm. 302.

¹¹ Ahmad Zain Sarnoto, “Konsepsi Politik, hlm. 32.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Muhammad Rifai, *Politik Pendidikan*, hlm. 17.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Abdul Rahman, “Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Islam-Tinjauan Epistemologi dan Isi-Materi”, *Jurnal Eksis*, Vol.8, No. 1 (2012), hlm. 2055.

¹⁷ UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 (Bandung: Fokusmedia, 2003). Hlm 3.

¹⁸ Abdul Rahman, “Pendidikan Agama, hlm. 2055.

¹⁹ Akh. Muzakkidan Kholilah, *Ilmu Pendidikan Islam* (Surabaya: Kopertais IV Press, 2011), hlm. 12-13.

²⁰ Muhammad Rifai, *Politik Pendidikan*, hlm. 17.

²¹ Maimunah, “Relasi Politik Pendidikan dan Politik Kekuasaan”, *Jurnal Al-Afkar*, Vol. 02 No. 02 (2013), hlm. 121.

²² Muhammad Rifai, *Politik Pendidikan*, hlm. 18.

²³ Muhammad Rifai, *Politik Pendidikan*, hlm. 19.

²⁴ Plato mendemonstrasikan dalam buku tersebut bahwa dalam budaya helenik, sekolah adalah salah satu aspek kehidupan yang terkait dengan lembaga-lembaga politik. Ia menjelaskan bahwa setiap budaya

mempertahankan kontrol atas pendidikan ditangan kelompok-kelompok elit yang secara terus menerus menguasai kekuasaan politik, ekonomi, agama, dan pendidikan. Plato menggambarkan adanya hubungan dinamis antara aktivis kependidikan dan aktivis politik. Keduanya seakan dua sisi dari satu koin, tidak mungkin terpisahkan. Analisis plato tersebut menjadi dasar bagi kajian hubungan politik dan pendidikan di kalangan ilmuwan generasi berikutnya. Lihat, Muhammad Rifai, *Politik Pendidikan*, hlm. 21-22.

²⁵Sunarso, “Pendidikan Politik dan Politik Pendidikan” *Jurnal Civics*, Vol. 4, No. 2 (2007), hlm. 27.

²⁶*Ibid.*, hlm. 28.

²⁷Muhammad Rifai, *Politik Pendidikan*, hlm. 20.

²⁸*Ibid.*, hlm. 20-21.

²⁹*Ibid.*, hlm. 21.

³⁰Sunarso, “Pendidikan Politik, hlm. 30.

³¹Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 11.

³²J. Sutarjo, “Urgensi Pengetahuan Sejarah Sosial Pendidikan Islam Dalam Dunia Akademis, *Jurnal Tarbiyah*, Vol. 11 No. 2 (2014), hlm. 254.

³³Kharisul Wathoni, “Pendekatan Sejarah dalam Kajian Politik Pendidikan Islam”, *Jurnal Tadris*, Vol. 8 No. 1 (2013), hlm. 6.

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*, hlm. 7-9.

³⁶*Ibid.*, hlm. 10.

³⁷*Ibid.*, hlm. 11.

³⁸Abuddin Nata, *Sejarah*, hlm.77-87.

³⁹Kharisul Wathoni, “Pendekatan, hlm. 11.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 16.

